

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KESENJANGAN
AKSES PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI
LAMPUNG**

Oleh

Apri Cahyati Lestari

2416041104

Reguler C



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan juga dipandang sebagai aspek penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global. Pendidikan harus dijadikan fondasi bangsa untuk maju dan sejahtera. Di Indonesia, pentingnya pendidikan bahkan tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari tujuan bernegara.

Pendidikan berperan penting dalam pembangunan bangsa karena menjadi jembatan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya alam yang melimpah sekalipun tidak akan berarti tanpa sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengelola hal dengan baik. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam pembangunan modern yang menekankan bahwa pembangunan manusia adalah inti dari pembangunan bangsa. Pendidikan ditempatkan sebagai salah satu aspek utama, bersama dengan kesehatan dan standar hidup yang layak. Oleh sebab itu, kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan daya saing bangsa di tingkat global.

Pendidikan berfungsi sebagai media penyampaian nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta persatuan nasional. Tantangan globalisasi berupa masuknya budaya asing, melemahnya nilai moral, hingga ancaman perpecahan bangsa, menjadikan pendidikan berperan sebagai salah satu benteng pertahanan. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teknis, tetapi juga dengan kesadaran kritis, cinta tanah air, serta komitmen pada persatuan bangsa. Tanpa adanya pendidikan yang menanamkan nilai kebersamaan, potensi konflik dan perpecahan dalam bangsa dapat terjadi.

Pendidikan dapat dipandang sebagai investasi bangsa dalam jangka panjang. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang dengan mencetak generasi yang unggul. Pendidikan menjadi penggerak utama yang akan menentukan sejauh mana Indonesia berkembang menjadi negara maju. Dalam UUD 1945 sudah jelas menempatkan pendidikan sebagai tujuan negara, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk abai terhadap sektor ini. Pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan penguatan nilai kebangsaan melalui pendidikan harus menjadi prioritas utama.

Pendidikan memiliki posisi yang sangat utama dalam pembangunan bangsa karena menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi sebuah hal yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan dan selalu mengalami dinamika perubahan. Apabila terjadi kesalahan dalam proses perumusan ataupun implementasi kebijakan pendidikan, akibat yang ditimbulkan dapat bersifat fatal, apalagi bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Pernyataan ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan realitas pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), seperti Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Pengawasan implementasi kebijakan pendidikan di daerah 3T sangat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan layanan pendidikan yang adil dan merata, sekaligus melihat kendala yang masih menghambat tujuan dalam pemerataan pendidikan (Hasbullah, 2015).

Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi tantangan di era digital. Perkembangan teknologi informasi menuntut sumber daya manusia di Indonesia untuk memiliki literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Jika tidak dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan yang relevan, bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan negara lain. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai gagasan baru, seperti penerapan Merdeka Belajar, penggunaan modul digital, hingga penyediaan beasiswa. Akan tetapi, tantangan pemerataan tetap menjadi salah satu

permasalahan besar, terutama di daerah-daerah 3T yang sering terabaikan dari arus pembangunan.

Pendidikan harus dipandang sebagai hak asasi manusia sekaligus sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Arah pembangunan pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas individu, tetapi juga pada pemerataan akses agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati layanan pendidikan. Penting untuk tahu bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan, apakah sudah sesuai dengan amanat pemerataan dan keadilan sosial atau justru masih menimbulkan kesenjangan baru (Soedijarto, 2008).

Namun kenyataannya, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kualitas pendidikan. Meskipun dalam UUD 1945 juga menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, kenyataannya menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan masih terasa, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Di daerah-daerah tersebut, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya tenaga pengajar, minimnya akses teknologi, serta kondisi geografis yang sulit menjadi penghambat. Hal ini berdampak pada ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia.

Sampai saat ini, kesenjangan kualitas pendidikan menjadi masalah yang terus berulang di Indonesia, terutama antara wilayah perkotaan dengan daerah terpencil. Meski pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, implementasinya belum optimal, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan,terluar). Kondisi ini membuat kualitas pendidikan di Indonesia semakin tertinggal di tengah derasnya arus globalisasi. Keterbatasan sarana prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, serta minimnya infrastruktur sekolah menjadi faktor yang menghambat peningkatan mutu pendidikan di wilayah-wilayah tertentu. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah, tetapi juga

berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan (Putera & Rhussary, 2018).

Kesenjangan pendidikan dapat terlihat dari beberapa acuan. Pertama, ketersediaan fasilitas pendidikan yang masih belum merata. Sekolah-sekolah di kota besar umumnya memiliki sarana yang memadai, baik dari segi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, maupun teknologi pembelajaran digital. Namun, banyak sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang masih kekurangan ruang belajar, guru, bahkan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet. Kedua, kualitas tenaga pendidik juga masih tidak setara. Guru-guru di daerah perkotaan umumnya memiliki kemampuan pendidikan lebih baik dan akses yang lebih mudah terhadap pelatihan, sementara guru di daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kapasitas. Salah satu hambatan pendidikan di daerah 3T adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah (Ananda, et al., 2025). Kondisi ini juga ditemukan di Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki wilayah pesisir dan pedalaman dengan akses terbatas, membuat pemerataan pendidikan semakin sulit.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi turut memperbesar kesenjangan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu biasanya mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan, terutama saat biaya kebutuhan sekolah dianggap membebani. Padahal pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program beasiswa, tapi pada nyatanya masih terdapat banyak siswa di beberapa daerah yang terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi.

Kebijakan pembangunan daerah tertinggal pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah melalui kebijakan berpihak, percepatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Program prioritas yang dapat dilakukan pemerintah daerah seperti pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur dan sarana, pengembangan wilayah perbatasan, hingga pencegahan dan rehabilitasi bencana (Syafii, 2018).

Di provinsi Lampung, kesenjangan pendidikan juga tampak jelas. Provinsi Lampung memiliki kondisi geografis yang cukup beragam, namun masyarakat Lampung khususnya di wilayah pedesaan, masih banyak yang tidak dapat menempuh pendidikan hingga jenjang menengah ke atas. Keterbatasan infrastruktur pendidikan di Lampung menjadi salah satu penyebab utama. Banyak sekolah di daerah pedesaan yang masih kekurangan fasilitas. Bahkan di beberapa wilayah, siswa harus menempuh jarak cukup jauh untuk bisa bersekolah. Hal ini seringkali menurunkan minat belajar dan meningkatkan angka putus sekolah, khususnya di tingkat SMP dan SMA. Selain itu, kesenjangan kualitas tenaga pendidik juga terasa di Lampung. Guru-guru di kota biasanya lebih berkualitas dan memiliki akses mudah pada pelatihan profesional, sedangkan di daerah pedesaan terpencil, guru seringkali harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena keterbatasan tenaga.

Kesenjangan pendidikan di Lampung juga tidak lepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Provinsi Lampung masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Pulau Sumatra. Keluarga miskin di Lampung seringkali lebih memilih menyekolahkan anak hanya sampai tingkat dasar, kemudian mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Pola pikir ini juga menyebabkan tingkat partisipasi sekolah di jenjang menengah dan atas masih rendah. Di kabupaten Pesisir Barat, permasalahan pemerataan pendidikan terlihat nyata. Sebagai kabupaten hasil pemekaran pada 2012 dan tergolong kabupaten baru di Provinsi Lampung, Pesisir Barat masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan.

Permasalahan kesenjangan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional mencapai 75,02, masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk dalam aspek pendidikan. Di Provinsi Lampung, IPM tahun 2024 tercatat sebesar 73,13, berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan, Kabupaten Pesisir Barat, capaian

IPM tahun 2024 hanya 66,73, dengan rata-rata lama sekolah sekitar 8,7 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara nyata masih banyak masyarakat Pesisir Barat yang hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah pertama, dan belum banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya permasalahan nyata dalam pemerataan pendidikan, terutama akses dan kualitas pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.

Kabupaten Pesisir Barat sebelumnya juga termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal (3T) berdasarkan penetapan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, melalui Keputusan Mendes-PDPT Nomor 490 Tahun 2024, status tersebut resmi dilepas pada Oktober 2024 (Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2024). Meskipun demikian, tantangan kesenjangan pendidikan di Pesisir Barat belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan masih relevan.

Hambatan nyata yang berpengaruh dalam pendidikan mencakup rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, akses fisik ke sekolah yang terbatas, dan minimnya fasilitas pendidikan. Untuk mengatasi itu, pemerintahan daerah harus menerapkan berbagai strategi, seperti membangun fasilitas sekolah yang memadai, memberikan beasiswa, memperbaiki akses ke sekolah, serta melakukan sosialisasi mendalam mengenai pentingnya pendidikan (Hardiasanti & Trihantoyo, 2021).

Pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat telah berupaya untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Pesisir Barat. Dengan memberikan program bantuan seperti KIP, BOS, maupun pembangunan sekolah baru yang sudah mulai dirasakan manfaatnya. Saat ini program beasiswa ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) dan ADik (Afirmasi Pendidikan Tinggi) sudah menjangkau masyarakat di Pesisir Barat. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung anak-anak Pesisir Barat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mengingat tantangan geografis, ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur membuat pemerataan pendidikan di Pesisir Barat masih membutuhkan perhatian

serius dan upaya khusus yang menyesuaikan dengan kondisi lokal. Terutama di sebagian wilayah Pesisir Barat yang masih sulit dijangkau.

Jika melihat dari gambaran nasional hingga daerah, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan merupakan masalah dasar yang memerlukan penanganan menyeluruh. Pesisir Barat sebagai daerah baru memiliki peluang untuk berkembang, tapi tanpa dukungan yang memadai, kesenjangan pendidikan akan terus berlangsung dan berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Dalam pandangan administrasi publik, pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan sebagai salah satu prioritas. Artinya, pendidikan tidak bisa hanya diserahkan pada sektor swasta atau upaya masyarakat sendiri, tapi harus ada tanggung jawab dari pemerintah melalui lembaga negara. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara fungsi pemerintahan daerah dengan penyelenggaraan pendidikan, di mana peran administrasi negara juga menjadi aspek penting untuk memastikan hak pendidikan masyarakat dapat terpenuhi.

Penyelenggaraan pendidikan juga tidak lepas dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya merupakan wujud nyata dari administrasi publik, karena di dalamnya melibatkan perencanaan program, pengalokasian anggaran, penyediaan sarana prasarana, pengangkatan tenaga pendidik, hingga pengawasan mutu pendidikan. Di sinilah terlihat bahwa pendidikan sebagai pelayanan publik tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem administrasi yang jelas dan terstruktur.

Layanan pendidikan ditujukan untuk semua lapisan masyarakat tanpa ketidaksetaraan. Pemerintah daerah harus mampu memastikan kemudahan akses, dan kualitas pendidikan agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Namun,

pelayanan pendidikan juga sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kualitas infrastruktur di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), serta lemahnya pengawasan kebijakan. Masalah-masalah ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana administrasi publik dikelola. Jika administrasi publik lemah, maka kebijakan pendidikan yang ideal sekalipun akan sulit diwujudkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan. Faktor tersebut menjadi alat analisis utama dalam melihat praktik kebijakan pendidikan di daerah 3T, termasuk Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Dari sisi sumber daya, keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah menjadi hambatan utama yang membuat kebijakan tidak berjalan optimal. Sementara itu, sikap pelaksana di lapangan, termasuk guru dan aparat daerah, sangat menentukan komitmen dalam mendorong partisipasi pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan di Pesisir Barat menjadi penting, karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemerataan akses pendidikan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

Penelitian ini dilakukan karena di Pesisir Barat masih terdapat kesenjangan nyata antara kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat dalam aspek pendidikan. Meskipun secara formal telah banyak kebijakan dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tata kelola, implementasinya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, anggaran, koordinasi, dan pengawasan. Padahal, daerah ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan yang terhambat oleh hambatan struktural serta kebijakan yang cenderung naik turun. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses pendidikan, rendahnya kualitas layanan kesehatan, dan lambatnya pembangunan infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademis maupun praktis, baik untuk memperkaya kajian implementasi kebijakan

di daerah 3T maupun sebagai evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah agar pembangunan di Pesisir Barat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian yang akan menjadi fokus kajian. Rumusan masalah ini dibuat untuk memperjelas arah penelitian.

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pendidikan dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat?
4. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kesenjangan terkait akses pendidikan di Kabupaten pesisir Barat?
5. Sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendidikan dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pendidikan dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

4. Untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kesenjangan terkait akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik secara teori maupun praktik. Secara teori, penelitian ini bisa menambah pengetahuan dalam bidang administrasi publik, terutama tentang bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan di daerah 3T (Tertinggal, terdepan, terluar) yang masih banyak menghadapi masalah, seperti sulitnya akses sekolah, kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik, serta keadaan ekonomi masyarakat. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, serta pihak provinsi dan pusat, untuk membuat strategi yang lebih tepat dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang pentingnya kerja sama semua pihak dalam mendukung pemerataan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dirasakan secara merata oleh seluruh warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., Yuliani, C. E., Misnati, K., Azzikra, R., Rahmadiyah, P. (2025). Analisis kesenjangan layanan pendidikan sekolah dasar antara sekolah perkotaan dan daerah 3T di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 392-404.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*. Jakarta: BPS.
- Hardiasanti, M., Trihantoyo, S. (2021). Implementasi wajib belajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 1064-1077.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Purwanto, E. A., Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. (2024). Pesisir Barat Resmi Terentaskan dari Status Daerah Tertinggal. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat. <https://pesisirbaratkab.go.id/berita/pesibar-resmi-lepas-sebagai-daerah-tertinggal>
- Putera, M. T. F., Rhussary, M. L. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) di Kabupaten Mahakam Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 12(2), 144-148.
- Soedijarto. (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153-171.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.